

PEMBERIAN *CLIMATE FINANCE* UNTUK PERUBAHAN IKLIM DARI UNFCCC KEPADA *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)*

Fajar Fitrianto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This thesis examines the Melanesian Spearhead Group (MSG) as a forum of countries in the Melanesian region that receive Climate Finance Grants in accordance with the agreements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Climate Finance scheme is utilized to support the funding of mitigation and adaptation policies related to climate change among MSG member states. The research method applied in this study is qualitative. The researcher also conducted a literature review by referring to various secondary data sources, primarily journals, books, and credible and relevant media outlets. The analytical process in this research employs international relations theories such as liberalism, as well as the concepts of regionalism and international regimes. The findings indicate that addressing climate change challenges particularly for developing countries with limited financial resources requires significant financial support from external parties. This also poses a challenge for MSG member countries. Through the allocation of budgets under Climate Finance policies, MSG countries are able to implement various strategies to confront the threats posed by climate change. Although MSG member states share common objectives in implementing climate policies, they differ in terms of the strategies and goals they aim to achieve.

Keywords: *Climate Finance, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Melanesia Spearhead Group (MSG), perubahan iklim, regionalisme, rezim internasional.*

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai forum negara-negara di kawasan Melanesia yang mendapatkan Dana Hibah untuk Iklim (Climate Finance) sesuai dengan kesepakatan dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Skema Climate Finance ini digunakan untuk mendukung pembiayaan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di antara negara-negara anggota MSG. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini bersifat kualitatif. Peneliti juga melakukan kajian pustaka dengan merujuk pada berbagai sumber data sekunder, terutama jurnal, buku, dan media massa dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hubungan internasional, seperti liberalisme, serta konsep regionalisme dan rezim internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya yang dihadapi oleh negara – negara berkembang dengan sumber daya finansial terbatas, sangat diperlukan dukungan pendanaan dari pihak lain. Hal ini juga menjadi tantangan bagi negara-negara anggota MSG. Dengan pengalokasian anggaran dalam kebijakan Climate Finance, negara-negara anggota MSG dapat melaksanakan berbagai kebijakan guna menghadapi ancaman perubahan iklim. Meskipun setiap negara anggota MSG memiliki fokus yang sama dalam pelaksanaan kebijakan iklim, perbedaan terletak pada strategi dan tujuan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: *Pembiayaan Iklim, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Melanesia Spearhead Group (MSG), perubahan iklim, regionalisme, rezim internasional.*

PENDAHULUAN

Tesis ini membahas pengalokasian anggaran Climate Finance di negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), yang ditujukan untuk berbagai sektor kebijakan guna mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim. Hal ini penting mengingat negara-negara anggota MSG menghadapi tantangan iklim yang kompleks, namun memiliki kapasitas nasional terbatas, terutama dalam hal pendanaan iklim. Sementara itu, risiko perubahan iklim semakin meningkat, diiringi dengan bertambahnya kebutuhan biaya untuk mitigasi dan adaptasi (Husein Latuconsina, 2010).

Keprihatinan masyarakat internasional terhadap fenomena perubahan iklim global kian meningkat, mengingat dampak negatifnya terhadap keberlanjutan kehidupan di Bumi akibat pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan di atmosfer. Ketika sinar matahari yang dipantulkan oleh Bumi mencoba kembali ke angkasa luar, sinar tersebut terhalang oleh lapisan gas ini, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi tersebut kembali memantul ke arah bumi, kemudian hal tersebutlah yang membuat temperatur di bumi semakin meningkat (Olufemi Adedeji. at al, 2014)

Perubahan iklim memang nyata. Cuaca yang tadinya panas terik bisa berubah menjadi hujan deras hanya dalam hitungan menit. Hujan yang turun hingga sehari-hari, padahal semestinya musim kemarau sedang berlangsung, atau semakin payau sumber air bersih masyarakat pesisir yang diakibatkan intrusi air laut. Hal-hal demikian dapat diindikasikan sebagai dampak dari perubahan iklim yang perlahan namun pasti, mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan yang merujuk pada segala unsur/variabel iklim menuju tren tertentu yang menyimpang dari kondisi biasanya dan diakibatkan oleh pemanasan global. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang mengalami perubahan tersebut meliputi suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan dan angin.

Perubahan iklim adalah fakta kehidupan. Buktinya, permukaan air laut kian meningkat, gletser di kutub menyusut, perubahan pola curah hujan, dan semakin menghangatnya suhu bumi. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), laju emisi gas rumah kaca saat ini kemungkinan besar akan menyebabkan kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,2 derajat celsius per dekade. Tinggi permukaan laut juga diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 0,26 – 0,81 meter di akhir abad sekarang, dan akan terus mengalami peningkatan pada abad-abad selanjutnya jika dunia tidak mampu mencegahnya (J.T.Houghton. At al, 2001). Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dalam hasil analisisnya mengungkapkan, jika kita segera bertindak sekarang melakukan upaya-upaya pencegahan, maka kita masih memiliki “ruang bernapas” atau tenggat waktu 10 hingga 15 tahun untuk memperlambat munculnya berbagai dampak perubahan iklim. Selain itu, biaya yang perlu dikeluarkan juga masih relatif rendah. Hal ini berbeda jika kita tidak melakukan atau menunda-nunda upaya pencegahan, maka “ruang bernapas” semakin sempit juga membutuhkan upaya dan biaya yang lebih besar (Miftahuddin, 2016)

Adanya perubahan iklim tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi dunia, termasuk negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Bahkan jika dilihat dari kondisi geografisnya, kawasan Melanesia dan sekitarnya, sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim seperti badai, banjir, gelombang pasang dan kekeringan (Adedeji. At al).Oleh karena itu, keadaan ini menuntut mereka untuk segera melakukan tindakan antisipasi berupa kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman perubahan iklim. Akan tetapi,

anggota MSG merupakan negara-negara yang kategorinya masih berkembang. Hal tersebut diperparah oleh terbatasnya sumber daya alam, isolasi geografis dan ketidakberdayaan ekonomi. Berdasarkan laporan PBB terkait klasifikasi negara-negara di dunia yang digolongkan menurut tingkat perekonomian, negara-negara MSG masuk kategori negara berkembang dan bahkan kurang berkembang. Hal itu terbukti dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota MSG yang rata-rata pertumbuhannya tidak pernah mencapai angka 4% setiap tahun (R. Cocomble, 2001).

Hadirnya ancaman perubahan iklim membuat negara-negara anggota MSG harus melakukan pengeluaran tambahan untuk membiayai kebijakan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim tersebut. Sementara itu, kebijakan iklim yang ambisius di negara berkembang seperti negara-negara MSG sangat bergantung pada mobilisasi dan aksesibilitas terhadap sumber daya keuangan. Pendanaan tersebut sangat penting untuk membiayai upaya mitigasi dan adaptasi pada komunitas mereka. Dengan demikian, hadirnya kebijakan Climate Finance ini menjadi semacam harapan bagi negara-negara anggota MSG untuk lebih siap menghadapi ancaman perubahan iklim di wilayahnya (Gorndon Leua Nanau, 2016).

KERANGKA ANALITIK

Penulis menggunakan konsep Regionalisme dalam membangun konstruksi logika sebagai acuan dalam menjelaskan topik penelitian. Björn Hettne, seorang ilmuwan dari Department of Peace and Development Research, Goteborg University, mengenalkan konsep regionalisme dalam salah satu jurnalnya bersama Fredrik Söderbaum yang berjudul *Theorising the Rise of Regionness* (Hettne dan Sidebaum, 2000). Hettne mengungkapkan bahwa regionalisme adalah fenomena yang benar-benar mendunia, yang terjadi di banyak wilayah di dunia. Perlu juga dicatat bahwa regionalisme secara simultan terkait dengan faktor domestik, terkadang berlawanan dengan konsep negara-bangsa, namun di lain waktu justru memperkuatnya.

Sementara itu, masih menurut Hettne dalam tulisannya Gema Ramadhan Bastari, kawasan/regional adalah sebuah entitas geografis yang berkembang melalui adanya integrasi yang berlandaskan pada kepentingan bersama. Regionalisme adalah sebuah proses politik yang mengarah pada peningkatan integrasi dari kawasan. Hettne menjelaskan regionalisme sebagai “sebuah proses dimana entitas geografis bertransformasi dari sekedar objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu untuk mengartikulasikan kepentingan transnasional dari kawasan itu sendiri” (Gema Ramadhan Bbastari, 2016).

Melalui paparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa regionalisme merupakan sebuah istilah hasil kehendak manusia yang mengkategorikan/mengelompokkan suatu wilayah menjadi sebuah kawasan regional tertentu. Pengelompokkan tersebut diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, latar belakang dan kepentingan. Nah, penggunaan konsep regionalisme dalam skripsi ini membantu penulis dalam menjelaskan kawasan Melanesia sebagai salah satu wujud dari regionalisme yang negara-negara anggotanya menjadi bagian dari objek pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian jenis ini,

sebagaimana menurut Mayer dan Greenwood dalam bukunya Ulber Silalahi, merupakan jenis penelitian yang mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Sementara itu, menurut Mely G. Tan dalam buku yang sama mengungkapkan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Bisa juga untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala mengenai adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain pada masyarakat. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena/peristiwa tapi tidak berdasarkan akurasi statistic (Ulber Silalahi, 2009).

PEMBAHASAN

A. Alokasi Anggaran Climate Finance di Fiji

Fiji memiliki target untuk bisa mengurangi CO₂ dari sektor energi pada tahun 2030, yang mana target tersebut telah dituangkan dalam kebijakan Fiji Green Growth Framework (Rear Admiral, 2014). Selain itu, sebagai upaya mitigasi, Fiji mengeluarkan kebijakan *Fiji's Intended Nationally Determined Contribution (INDC)* yang mengatur soal kebijakan pada bidang energi, yakni meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam pembangkit listrik, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat (Fiji's, 2016). Melalui upaya-upaya tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi konsumsi Fiji terhadap bahan bakar fosil yang tentunya sejalan dengan pengurangan terhadap impor bahan bakar.

Selanjutnya, dalam upaya adaptasi, Fiji banyak melakukan kebijakan yang sifatnya peningkatan kapasitas terhadap masyarakat dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Dan Gavidi at al, 2017). Misalnya, terdapat kebijakan yang pendekatannya terpadu terkait ketahanan bangunan di daerah perkotaan dan pedesaan terhadap terpaan badai topan.

Dalam melaksanakan berbagai upayanya tersebut, tentunya membutuhkan anggaran yang besar. Salah satu sumber anggarannya berasal dari Global Environment Facility (GEF) (About GEF). Jadi, GEF melakukan transfer dana. Berikut rincian pengalokasian anggaran berdasarkan jenis, jumlah anggaran, dan tahun dilaksanakannya kebijakan (Recipient Countries)

B. Alokasi Anggaran Climate Finance di Papua Nugini

Papua Nugini telah menargetkan pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca sebesar 90% pada tahun 2050. Pengurangan emisi melalui kebijakan penggunaan lahan dan kehutanan yang terkontrol merupakan fokus utama dari upaya mitigasinya. Kemudian untuk mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil, Papua Nugini melakukan upaya transisi menuju energi terbarukan. Prioritas mitigasi ini ditentukan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan strategi pembangunan yang kompatibel dengan iklim (MSG Secretariat, 2021).

Terkait upaya adaptasi, Papua Nugini memiliki berbagai bidang prioritas, diantaranya:

- Ketahanan pangan;
- Penanggulangan banjir dan rob;
- Kerusakan terumbu karang;

- Air bersih dan sanitasi;
- Imigran/pengungsi iklim; dan
- Ketahanan iklim.

C. Alokasi Anggaran Climate Finance di Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon telah menargetkan hingga tahun 2025, sektor mitigasi yang diprioritaskan adalah sumber energi terbarukan berupa tenaga air, surya, panas bumi dan efisiensi terhadapnya. Dimana rencana tersebut menetapkan 79% pembangkit listrik di Solomon harus berasal dari sumber energi terbarukan hingga tahun 2030. Hasilnya, sudah ada peningkatan efisiensi dan konservasi energi sebesar 10% pada tahun 2019 dan akan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Meskipun sudah mulai menunjukkan hasil pada sektor efisiensi energi, namun untuk sektor lain masih ada yang belum tercapai. Sebagaimana laporan INDC terbaru yang diterbitkan Solomon, salah satunya adalah kebijakan inventarisasi terhadap gas rumah kaca baru tercapai hingga tahun 2019, untuk tahun 2020–2021 belum tersedia. Hal itu dikarenakan laporan Third National Communication (TNC) and Biennial Update Reports (BUR) sebagai dokumen pelengkapannya belum rampung (Honourable Titus Fika, 2021).

Pada kebijakan adaptasi, Kepulauan Solomon memprioritaskan kebijakannya pada sektor-sektor berikut:

- Pertanian dan ketahanan pangan;
- Air dan sanitasi;
- sumber daya laut dan perlindungan pesisir;
- Pemukiman manusia; dan
- Infrastruktur dan pariwisata

Pencapaian utama dalam kebijakan adaptasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management and Meteorology (MECDM)* yakni mampu memastikan bahwa semua proyek yang didanai oleh sumber eksternal, yang dalam hal ini GEF, mendukung pelaksanaan program adaptasi masyarakat dan langkah-langkah mitigasi. Namun, ada tindakan lain yang belum maksimal dilaksanakan sehingga dampaknya belum begitu terasa, berikut diantaranya:

- Pemetaan kerentanan berbasis masyarakat, perencanaan adaptasi dan pendekatan pengelolaan untuk proyek adaptasi berbasis masyarakat di seluruh pulau;
- Pembentukan struktur kelembagaan dan penguatan kapasitas di tingkat masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemetaan kerentanan dan perencanaan adaptasi berbasis masyarakat di seluruh negara;
- Menyisihkan pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk bahan bakar.

D. Alokasi Anggaran Climate Finance di Vanuatu

Vanuatu menargetkan untuk bisa menghasilkan energi listrik yang bersumber dari tenaga panas bumi pada tahun 2025; mencapai target 100% energi terbarukan dalam pembangkit listrik (tidak ada tahun yang ditentukan; namun, Peta Jalan Energi Nasional Vanuatu tahun 2013 menetapkan target 40% pembangkit energi terbarukan pada tahun 2015 dan 65% pada tahun 2020). Untuk mencapai target mitigasinya tersebut, dilakukan berbagai upaya dan kebijakan. Adapun implementasi kegiatan mitigasi tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Menjajaki peluang intervensi untuk substitusi dan penggantian bahan bakar fosil yang menggunakan minyak kelapa untuk pembangkit listrik;
- Menerapkan proyek energi terbarukan *off-grid* di bawah program yang ada Scaling Up Renewable Program Energi di Negara Berpenghasilan Rendah.

Selain itu, Vanuatu juga melakukan kebijakan pada sektor adaptasi, berikut target kebijakannya: (Secretariat, Climate Finance Strategy).

- Pertanian dan ketahanan pangan;
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan;
- Pengelolaan hutan lestari; dan
- Pengelolaan sumber daya air terpadu.

E. Perbandingan Alokasi Anggaran Climate Finance di Negara-Negara Anggota MSG

Pemetaan di atas menunjukkan distribusi penggunaan anggaran Climate Finance yang dituangkan dalam bentuk kebijakan mitigasi dan adaptasi pada masing-masing negara anggota MSG. Diketahui bahwa jumlah anggaran Climate Finance yang disalurkan oleh GEF kepada setiap negara-negara anggota MSG mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan masing-masing negara menerima jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut seiring dengan risiko dan ancaman dari perubahan iklim itu sendiri yang turut mengalami peningkatan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan GEF berdasarkan kebutuhan, efisiensi dan prediktibilitas di masing-masing negara peserta.

Secara umum, anggaran yang diterima oleh negara-negara MSG tersebut dialokasikan terhadap berbagai fokus kebijakan yang meliputi perairan/maritim, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan pertanian, pengelolaan limbah, tata ruang kota dan desa serta peningkatan kapasitas iklim berbasis masyarakat. Jadi, setiap negara-negara anggota MSG sebetulnya memiliki fokus yang sama dalam melaksanakan kebijakan iklimnya, yang membedakan hanya strategi pelaksanaan dan target yang ingin dicapainya.

Selanjutnya, pada proses implementasi kebijakan-kebijakan di atas, MSG melakukan pengawasan terhadap seluruh negara anggota. Hal tersebut merupakan salah satu tugas MSG sebagai organisasi regional di Melanesia sebagaimana mandate UNFCCC dalam Keputusan 6 COP23 paragraf 20 untuk memastikan bahwa pembiayaan iklim dapat diakses secara efektif, dimobilisasi dan dilaksanakan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan iklim di global. MSG juga mendukung negara-negara anggotanya dalam menentukan kebutuhan pendanaan iklim mereka dengan melakukan analisis dan evaluasi rencana aksi keuangan dan pelaporan atas hasil dari setiap kebijakan (Secretariat).

KESIMPULAN

Perubahan iklim merupakan keniscayaan bagi dunia, tak terkecuali kawasan melanesia. Dunia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang tentunya membawa dampak negatif bagi daya dukung alam terhadap kehidupan manusia. Melanesia sebagai sebuah kawasan yang terletak di sekitar Samudera Pasifik adalah salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim. Eksistensi mereka, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara terancam sirna. Kenaikan muka air laut, badai dan topan, banjir, kekeringan, krisis pangan dan air bersih hingga wabah penyakit menghantui kehidupan mereka.

Karakteristik wilayah Melanesia yang terdiri atas gugusan kepulauan atol dan dengan permukaan daratan yang hampir sama dengan muka air laut, menjadikan gelombang laut dengan mudah

menggenangi wilayah daratan. Terlebih pada saat musim gelombang tinggi atau ketika terjadi badai atau topan. Pada saat demikian, air laut bukan hanya sekedar menggenangi wilayah daratan dan pemukiman, tapi juga menghempaskan bangunan dan mengikis luas daratan secara perlahan.

Keadaan tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan dan mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Hal itu diperparah dengan keadaan negara-negara melanesia yang merupakan negara-negara berkembang yang berpenghasilan rendah: yang menggantungkan sebagian besar pendapatan nasionalnya dari sektor pariwisata dan sumber daya alam, khususnya hasil laut; menjadikan mereka harus berupaya lebih keras agar bisa survive menghadapi persoalan tersebut. Faktor keuangan merupakan tantangan terbesar bagi negara-negara anggota MSG, sehingga secara finansial mereka tidak mungkin bisa menghadapi perubahan iklim yang mengancam wilayahnya tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Melalui mekanisme Climate Finance ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Hal ini diakibatkan isu perubahan iklim bukan semata urusan negara-negara yang paling terancam saja, tapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang mendiami planet bumi, khususnya negara-negara dengan penghasil karbon tinggi. Supremasi climate change justice harus ditegakkan demi terciptanya kebersamaan dan keselarasan dalam menjaga planet bumi ini dari kerusakan.

Oleh karena itu, dengan dialokasikannya anggaran kebijakan Climate Finance ini, negara-negara anggota MSG dapat melaksanakan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di wilayahnya. Total anggaran yang sudah dialokasikan oleh GEF terhadap negara-negara anggota MSG mencapai 211.340.594 USD untuk membiayai 64 kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim di sana. Rinciannya, Fiji melaksanakan 15 kebijakan dengan anggaran sebesar 18.991.809 USD; Papua Nugini melaksanakan 16 kebijakan dengan anggaran sebesar 82.149.126 USD; Kepulauan Solomon melaksanakan 15 kebijakan anggaran 61.496.082 USD: dan Vanuatu melaksanakan 18 dengan anggaran 48.763.577 USD. Dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan iklim terhadap keempat negara anggotanya, MSG memberikan dukungan dan pengawasan supaya anggaran Climate Finance yang dialokasikan oleh GEF tersebut dapat dimobilisasi dan diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

(Cambridge, UK., 2001).

“Recipient Countries,” diakses pada 2/02/2022, <https://www.thegef.org/projects-operations/recipient-countries>.

2bjNs7m0JAlcR2ph0NgAZzj52gEPVzy0Zc_eshKliHM6iOMNFHRXoP7TBatA02nN6Ju9TIFRySQLc4&journalCode=cnpe20.

About GEF.”

Adedeji, Reuben, dan Olatoye, “Global Climate Change.”

Björn Hettne dan Fredrik Söderbaum, “Theorising the Rise of Regionness,” *New Political Economy* Vol 5 (2000): 157–

173,

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713687778?casa_token=Lm2rwkAoOIYAAAAA%3A-

C.A. Jhonson., *Climate Change 2001 The Scientific Basis Third Assessment Report IPCC*

Gema Ramadhan Bastari, “Regionalisme Isu Lingkungan Asia Tenggara (1997-2000),” *Andalas Institute of International Studies – ASSIST Vol 5*, no. *Andalas Journal of*

- International Studies (2016): 42–60,
<http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/61>.
- Gordon Leua Nanau, “The Melanesian Spearhead Group and Pacific Cooperation,”
Pacific Studies Vol 39 No (2016): 282–309,
https://www.researchgate.net/publication/313580962_The_Melanesian_Spearhead_Group_and_Pacific_Regional_Cooperation.
- Honourable Titus Fika, *Nationally Determined Contribution (NDC) Solomon Islands 2021* (Honiara, Solomon Islands, 2021),
[https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Solomon_Islands_First/NDC_Report_2021_Final_Solomon_Islands_\(1\).pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Solomon_Islands_First/NDC_Report_2021_Final_Solomon_Islands_(1).pdf).
- J.T. Houghton. Y. Ding D.J. Griggs. M. Noguier. P.J. van der Linden. X. Dai. K. Maskell.
Journal of Geoscience and Environment Protection 2 (2014): 114–122.
- Latuconsina, Husain. “Dampak Pemanasan Global Terhadap Ekosistem Pesisir Dan Lautan.” *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)* Vol. 3 Edi (2010): 30–37.
- Miftahuddin, “Analisis Unsur-unsur Cuaca dan Iklim Melalui Uji Mann-Kendall Multivariat,” *Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi (JMSK)* 13 (2016): 26–38, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk>.
- MSG Secretariat, *Climate Finance Strategy 2019-2021 Annex: Technical Assessment*, n.d., https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FTC_MSG_Technical_Report.pdf.
- Olufemi Adedeji, Okocha Reuben, dan Olufemi Olatoye, “Global Climate Change,” R. Crocombe, *The South Pacific* (Suva: University of the South Pacific, 2001).
Secretariat, *Climate Finance Strategy 2019-2021 Annex: Technical Assessment*.
- Secretariat, *Melanesian Spearhead Group Climate Finance Strategy 2019 - 2021*.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah badan internasional terkemuka untuk penilaian perubahan iklim yang tersusun dari 195 anggota negara di dunia, serta ribuan ilmuwan pakar internasional yang secara sukarela menganalisis perubahan iklim di bumi dan menyarankan tindakan penanggulangan. IPCC juga bisa disebut sebagai Dewan iklim PBB.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).